



Vol. 3, No. 2, Tahun 2025

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

AMPOEN

Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat



Diterbitkan oleh:
Universitas Serambi Mekkah - Banda Aceh

**Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian
Orientasi Masyarakat**

JURNAL AMPOEN

VOL. 3, NO. 2, TAHUN 2025

HALAMAN : 264-277

**MENUJU KEMANDIRIAN NEGERI: EDUKASI SPMDESA DI NEGERI
TAMILOUW TAHUN 2025**

JUSUF MADUBUN, WAHAB TUANAYA, MUHTAR

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PATTIMURA**

Artikel di Jurnal AMPOEN

Tersedia di : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

DOI : <https://doi.org/10.32672/ampoen.v3i2.3880>

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini

APA : Madubun, J., Wahab Tuanaya, & Muhtar. (2025). MENUJU KEMANDIRIAN NEGERI: EDUKASI SPMDESA DI NEGERI TAMILOUW TAHUN 2025. Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 264–277. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v3i2.3880>

Lainnya Kunjungi : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (Jurnal AMPOEN): *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* dengan Visi “*Berdaya melalui Abdi, Merdeka dalam Publikasi*” sebagai platform bagi para pengabdi, peneliti, praktisi, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil layanan yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat di Indonesia. Berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu diantaranya pendidikan, ekonomi, agama, teknik, teknologi, pertanian, sosial humaniora, komputer, kesehatan dan lain sebagainya.

Semua artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini dilindungi oleh hak cipta dan dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons 4.0 International License (CC-BY-SA) atau lisensi yang setara sebagai lisensi optimal untuk publikasi, distribusi, penggunaan, dan penggunaan ulang karya ilmiah.





MENUJU KEMANDIRIAN NEGERI: EDUKASI SPMDesa DI NEGERI TAMILUW TAHUN 2025

**Jusuf Madubun¹, Wahab
Tuanaya², Muhtar³**

1,2,3

**Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Pattimura**

*** Email Korespondensi:**

jusufucu16@gmail.com

Riwayat Artikel

Penyerahan : 25/10/2025
Diterima : 05/11/2025
Diterbitkan : 07/11/2025

Abstrak

Artikel pengabdian ini memaparkan program “Menuju Kemandirian Negeri: Edukasi SPMDesa di Negeri Tamilouw Tahun 2025” yang bertujuan menegakkan standar layanan dasar melalui penataan SOP dan service charter ber-SLA, penguatan tata kelola data berbasis Rumah Dataku, serta penguatan forum musyawarah triwulan. Pendekatan partisipatif digunakan melalui identifikasi masalah dan pemangku kepentingan, FGD, pelatihan andragogi, pendampingan simulasi musyawarah, dan penyusunan rekomendasi-panduan praktis. Intervensi berfokus pada standardisasi layanan (adminduk, posyandu, PIK R, BKL, rujukan ibu hamil), integrasi data sebagai single source of truth, dan pengaitan keputusan-indikator-anggaran agar belanja desa membeli capaian, bukan sekadar aktivitas. Hasil awal menunjukkan peningkatan pemahaman SPMDesa, terbitnya draf SOP prioritas, jalur pengaduan mediasi yang terukur, serta perintisan dashboard indikator yang menarik data dari Rumah Dataku. Selain itu, UPPKA dirancang sebagai pengungkit ekonomi keluarga untuk menutup biaya tidak langsung akses layanan, menjaga keberlanjutan partisipasi warga. Konvergensi dengan fokus Dana Desa 2025 dan horizon SDGs Desa memastikan relevansi sosial dan keberlanjutan. Model integratif ini menegaskan bahwa kemandirian layanan dasar dapat dicapai ketika standar yang jelas, data yang kredibel, forum yang akuntabel, dan pembiayaan yang terarah bekerja secara sinergis.

Kata kunci: SPMDesa; Rumah Dataku, SOP, service charter, tata kelola data

Abstract

This community service article describes the program "Towards National Independence: SPMDesa Education in Tamilouw Village in 2025" which aims to uphold basic service standards through the arrangement of SOPs and service charters with SLAs, strengthening data governance based on Rumah Dataku, and strengthening quarterly deliberation forums. A participatory approach is used through problem and stakeholder identification, FGDs, andragogy training, mentoring in deliberation simulations, and the development of recommendations and practical guidelines. Interventions focus on service standardization (adminduk, posyandu, PIK R, BKL, referrals for pregnant women), data integration as a single source of truth, and linking decisions, indicators, and budgets so that village spending buys achievements, not just activities. Initial results show an increase in understanding of SPMDesa, the issuance of a draft priority SOP, a measurable mediation complaint channel, and the piloting of an indicator dashboard that draws data from Rumah Dataku. In addition, UPPKA is designed as a family economic lever to cover indirect costs of service access, maintaining sustainable community participation. The convergence of the 2025 Village Fund focus and the Village SDGs horizon ensures social relevance and sustainability. This integrative model affirms that self-reliance in basic services can be achieved when clear standards, credible data, accountable forums, and targeted financing work synergistically.

Keywords: SPMDesa; Rumah Dataku, SOP, service charter, data governance



PENDAHULUAN

Kemandirian sebuah negeri pada dasarnya ditentukan oleh kemampuan pemerintahan lokal memastikan layanan dasar terpenuhi secara merata, terukur, dan berkelanjutan. Dalam kerangka itulah Standar Pelayanan Minimal Desa (SPMDesa) menjadi instrumen penting bukan sekadar daftar layanan, melainkan tata kelola menyeluruh yang memadukan regulasi, kelembagaan, sumber daya, prosedur operasional, penganggaran, hingga mekanisme pengaduan dan evaluasi kinerja. Penerapan SPMDesa menuntut kepastian standar bagi warga, akuntabilitas bagi penyelenggara, serta penggunaan data sebagai dasar semua keputusan. Negeri Tamilouw di Kabupaten Maluku Tengah memiliki sejumlah prasyarat yang mendukung penerapan tersebut, mulai dari keberadaan ekosistem kampung keluarga berkualitas (kampung kb) dengan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, pusat informasi dan konseling remaja, sekretariat kkb, hingga rumah data kependudukan (rumah dataku) yang dapat berfungsi sebagai simpul informasi. Selain itu, budaya perencanaan dan evaluasi yang berlangsung triwulanan menandai adanya iklim tata kelola yang terus bertumbuh dan siap menerima penguatan.

Secara geografis, Tamilouw berada pada posisi strategis yang berbatasan dengan negeri wahai di utara, laut banda di selatan, negeri sepa di timur, dan negeri haya di barat. Ruang sosialnya terbagi dalam empat puluh rukun tetangga yang menjadi unit pelayanan terdekat dengan warga. Sarana dasar tersedia dalam bentuk satu fasilitas kesehatan, dua pustu, sepuluh posyandu, empat rumah ibadah, dan empat belas sekolah. Dari sisi kependudukan, data administrasi mencatat 1.685 kepala keluarga dengan total 11.624 jiwa 5.009 laki-laki dan 6.615 perempuan. Sementara itu, dasbor Kampung KB memperlihatkan angka yang berbeda, yakni 1.726 kepala keluarga dan 7.131 jiwa, dengan rincian 1.264 pasangan usia subur, 1.227 remaja, 563 keluarga yang memiliki balita, 532 keluarga yang memiliki remaja, serta 115 keluarga yang memiliki lansia. Perbedaan ini memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk melakukan rekonsiliasi dan

pemutakhiran data agar perencanaan layanan tidak bertumpu pada asumsi, melainkan pada informasi yang tervalidasi. Dalam konteks tata kelola modern, data berperan sebagai fondasi akuntabilitas: ia menentukan bagaimana persoalan diidentifikasi, prioritas ditetapkan, anggaran dialokasikan, dan hasil dievaluasi.

Di tengah modal kelembagaan yang relatif kuat, praktik pelayanan publik pada tingkat akar rumput masih menghadapi beberapa tantangan. Standar operasional prosedur di berbagai bidang belum sepenuhnya terdokumentasi secara seragam, sehingga warga sering kali tidak memperoleh kejelasan mengenai persyaratan, alur, dan durasi layanan, sedangkan penyelenggara kesulitan menjaga konsistensi mutu. Pemanfaatan data dari Rumah Dataku serta sumber-sumber rutin belum benar-benar terhubung dengan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, sehingga kegiatan cenderung berorientasi pada seremonial dan administrasi, bukan pada indikator hasil yang menyentuh kebutuhan warga. Rantai koordinasi antarpihak perangkat negeri, pokja KKB, tenaga kesehatan dan kader, sekolah, serta PLKB/PKB memang berlangsung melalui pertemuan triwulan, tetapi belum sepenuhnya berbasis indikator layanan prioritas sehingga evaluasi yang dilakukan kerap bersifat deskriptif, bukan analitis. Dari sisi kemandirian ekonomi keluarga, belum adanya Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) membatasi daya ungkit intervensi sosial dan kesehatan, padahal keberhasilan perubahan perilaku jangka panjang sangat dipengaruhi oleh kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kondisi tersebut menegaskan urgensi edukasi SPMDesa sebagai gerak bersama untuk menata standar, menyatukan data dengan kebijakan, dan menumbuhkan budaya evaluasi yang berorientasi hasil. Edukasi diarahkan bukan hanya untuk memperkenalkan konsep, tetapi juga membangun kebiasaan kerja baru: setiap layanan wajib memiliki standar yang jelas, setiap keputusan harus ditopang data yang tervalidasi, dan setiap capaian diukur dengan indikator yang disepakati. Rumah Dataku diposisikan sebagai sumber tunggal kebenaran yang

memadukan data administrasi, data rutin BKKBN, dan data sektoral lainnya, sehingga musyawarah perencanaan tidak lagi mengandalkan intuisi belaka. Pemutakhiran definisi operasional indikator misalnya cakupan dokumen kependudukan per kepala keluarga, proporsi balita dengan imunisasi dasar lengkap, persentase ibu hamil dengan kunjungan K1 hingga K4, tingkat partisipasi remaja pada kegiatan PIK R, serta intensitas layanan lansia memberi arah yang jelas bagi perencanaan layanan posyandu, PIK R, BKL, dan layanan pendidikan nonformal. Dengan demikian, alokasi sumber daya dapat ditautkan langsung dengan target kuantitatif maupun kualitatif yang relevan.

Di sisi lain, kualitas layanan berkelindan dengan kemampuan sistem menangani keluhan dan potensi konflik. Karena itu, edukasi SPMDesa di Tamilouw juga menekankan manajemen konflik berbasis musyawarah negeri. Penataan alur pengaduan, mekanisme mediasi, berita acara yang rapi, dan standar waktu tanggap menjadi bagian integral dari perbaikan. Ketika warga memahami haknya dan penyelenggara menjaga kepastian layanan melalui service charter, kepercayaan sosial meningkat dan ruang dialog terbuka. Hal ini sangat penting dalam konteks negeri kepulauan yang plural, di mana penyelesaian sengketa secara cepat dan adil mencegah eskalasi serta menjaga kohesi sosial.

Program “Menuju Kemandirian Negeri: Program Edukasi SPMDesa di Negeri Tamilouw Tahun 2025” dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara potensi kelembagaan dan tuntutan standar layanan. Rangkaian kegiatannya meliputi asesmen cepat untuk memetakan kondisi faktual, pelatihan partisipatif yang menggabungkan konsep dan praktik, klinik penyusunan SOP yang menghasilkan naskah ringkas dan aplikatif, serta lokakarya data untuk merekonsiliasi angka-angka yang berbeda dan menyepakati tata kelola data. Pendekatan ini diperkuat oleh pendampingan penyusunan rencana aksi yang memuat target triwulan serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang sederhana namun ketat. Hasil yang diharapkan pada tahap awal meliputi tersusunnya SOP prioritas lintas layanan, peta layanan dasar dan alur rujukan per dusun dan rukun tetangga, matriks indikator yang terukur untuk

periode 2025–2026, serta perintisan dasbor SPMDesa yang menarik data dari Rumah Dataku. Selain itu, program mendorong pembentukan UPPKA sebagai penopang kemandirian ekonomi keluarga sehingga dampak sosial dari layanan dasar dapat dipertahankan.

Manfaat dari pendekatan ini diharapkan menjangar pada beberapa tingkat. Bagi warga, hadirnya standar yang jelas memberi kepastian akses, mengurangi biaya transaksi, dan memperkuat posisi ketika menyampaikan keluhan. Bagi penyelenggara, indikator yang terukur memudahkan manajemen kinerja, mempercepat identifikasi hambatan, dan mendorong inovasi berbasis bukti. Bagi pemerintah daerah dan mitra pendukung, sinkronisasi data program anggaran membuka ruang untuk konvergensi pendanaan dan pembinaan teknis yang lebih efektif. Bahkan bagi negerinegeri tetangga seperti Wahai, Sepa, dan Haya, pengalaman Tamilouw dapat menjadi rujukan replikasi yang mempercepat konvergensi layanan dasar di tingkat kecamatan.

Ruang lingkup program disusun mengikuti mandat SPMDesa dan ekosistem Kampung KB yang telah berjalan. Fokus diarahkan pada layanan administrasi kependudukan, kesehatan ibu–anak dan balita, pendidikan dan pemberdayaan remaja, layanan lansia, layanan sosial bagi kelompok rentan, dan pengelolaan pengaduan publik. Batasan utama terletak pada ketersediaan dan kualitas data; karena itu, sejak awal disiapkan berita acara validasi untuk menyamakan angka dan mendefinisikan ulang satuan hitung yang akan dipakai bersama. Pembentukan UPPKA ditempatkan sebagai tahap perintis pada 2025 dengan rancangan penguatan kelembagaan, jejaring pemasaran, dan akses permodalan pada tahun berikutnya, sehingga dimensi ekonomi rumah tangga tumbuh sejalan dengan perbaikan layanan sosial dan kesehatan.

Keseluruhan rancangan ini menegaskan bahwa kemandirian Negeri Tamilouw tidak lahir dari satu intervensi tunggal, melainkan dari konsistensi praktik baik yang saling menopang: standar layanan yang jelas, pemanfaatan data yang andal, partisipasi warga yang bermakna, dan evaluasi berkala yang jujur terhadap capaian. Dengan modal

kelembagaan yang telah ada, dukungan pendamping lapangan, dan komitmen pemerintah negeri, edukasi SPMDesa pada tahun 2025 diharapkan menjadi katalis perubahan menggeser layanan dari sekadar kegiatan menjadi hasil yang dirasakan, dan mengubah data dari sekadar angka menjadi dasar pengambilan keputusan yang menjejathterakan.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini mengacu pada pendekatan partisipatif (*participatory approach*) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran kritis, memperkuat kapasitas lokal, serta mendorong kolaborasi antaraktor di tingkat negeri. Seluruh tahapan diselaraskan dengan agenda edukasi SPMDesa dan kondisi kelembagaan di Negeri Tamilouw, termasuk pemanfaatan Rumah Dataku, mekanisme musyawarah triwulan, serta integrasi dengan ekosistem Kampung KB. Adapun tahapan dan metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah dan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*). Kegiatan dimulai dengan observasi lapangan, *walkthrough* layanan (*adminduk*, *posyandu*, *PIK R*, *BKL*), wawancara awal, dan diskusi informal dengan kepala pemerintahan negeri, *saniri* negeri, tokoh adat dan agama, tokoh perempuan, pemuda, kader kesehatan/KB, serta perwakilan sekolah. Tahap ini menggali isu-isu utama tata kelola, memetakan ketimpangan layanan dasar, dan mengidentifikasi aktor kunci yang perlu dilibatkan dalam penerapan SPMDesa. Secara khusus, tim melakukan *data scan* awal terhadap angka administrasi dan dasbor Kampung KB untuk menandai disparitas data yang akan direkonsiliasi pada tahap berikutnya.
2. FGD (*Focus Group Discussion*). Serangkaian diskusi kelompok terarah diselenggarakan untuk mendalami isu yang telah teridentifikasi, antara lain partisipasi warga dalam layanan dasar,

transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa untuk layanan minimum, peran *Saniri* Negeri dalam fungsi kontrol, sinkronisasi antara pranata adat dan pemerintahan formal, serta penanganan keluhan masyarakat. FGD dibagi berdasarkan klaster aktor perangkat negeri, *Saniri*, tokoh adat/agama, tenaga kesehatan dan kader, perwakilan perempuan dan pemuda, serta masyarakat umum dengan keluaran berupa prioritas masalah, *service gaps*, dan usulan standar layanan awal.

3. Pelatihan dan peningkatan kapasitas (*capacity building*). Pelatihan ditujukan kepada perangkat negeri, *saniri* negeri, dan perwakilan masyarakat/kelompok kerja untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan praktis. Materi yang diberikan meliputi:
 - a) Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kerangka SPMDesa
 - b) Konsep dan praktik demokrasi partisipatif serta inklusi kelompok rentan;
 - c) Teknik fasilitasi musyawarah negeri yang efektif dan *service charter* berbasis hak warga
 - d) Pengelolaan dan transparansi Dana Desa yang berorientasi pada indikator hasil layanan
 - e) Pengantar *data governance* dan pemanfaatan Rumah Dataku untuk perencanaan–penganggaran.Metode pelatihan menggunakan *andragogi* (pembelajaran orang dewasa) melalui studi kasus lokal, *role-play*, simulasi musyawarah, dan klinik penyusunan indikator.
4. Pendampingan dan simulasi musyawarah negeri. Tim pengabdian mendampingi simulasi musyawarah negeri yang partisipatif dengan melibatkan beragam unsur masyarakat. Dalam simulasi ini dipraktikkan perencanaan dan/atau evaluasi program layanan dasar misalnya peningkatan cakupan *posyandu* balita, layanan remaja *PIK R*, layanan lansia *BKL*, serta *front office* *adminduk* dengan memastikan suara perempuan, remaja, dan kelompok rentan terakomodasi. Simulasi juga menguji alur pengaduan–mediasi dan standar waktu

tanggap (SLA) untuk memperkuat kepercayaan publik.

5. Penyusunan dokumen rekomendasi dan panduan praktis. Bersama masyarakat dan pemerintah negeri, disusun dokumen rekomendasi dan panduan tata kelola berbasis partisipatif yang selaras dengan SPMDesa. Dokumen memuat: peta urusan dan layanan minimum; draf SOP ringkas per layanan (persyaratan, alur, waktu, biaya jika ada, mekanisme pengaduan); rancangan *service level agreement*; matriks indikator kinerja input–proses–output–outcome; serta skema integrasi data Rumah Dataku dalam siklus perencanaan–penganggaran–pelaporan. Keluaran tambahan berupa Rencana Aksi SPMDesa 2025–2026 berikut jadwal rapat koordinasi dan monev triwulan, serta rencana perintisan UPPKA sebagai pengungkit kemandirian ekonomi keluarga.

Pada setiap tahap, dilakukan pencatatan partisipasi, *learning log*, dan berita acara. Mengingat terdapat disparitas antara data administrasi dan dasbor Kampung KB, proses validasi dan rekonsiliasi data dilaksanakan melalui lokakarya kecil (*data clinic*) untuk menyepakati definisi operasional indikator, sumber data rujukan, serta tata cara pemutakhiran berkala. Hasil validasi dituangkan dalam berita acara sebagai dasar sah penetapan target dan evaluasi layanan. Monev dilaksanakan secara triwulan melalui review capaian indikator, audit cepat mutu layanan di titiktitik pelayanan, dan forum umpan balik warga. Temuan lapangan digunakan untuk memperbarui SOP, menyempurnakan *service charter*, serta menyesuaikan alokasi sumber daya. Siklus perbaikan berkelanjutan ini memastikan standar yang disepakati benar-benar terimplementasi dan dirasakan manfaatnya oleh warga.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Standardisasi Layanan & Penyusunan SOP

Kesenjangan standar operasional antar lini layanan adminduk, posyandu balita, layanan remaja (PIK R), lansia (BKL), rujukan kesehatan ibu, pendidikan nonformal, hingga pengaduan mediasi

segera berdampak pada kepastian hak warga dan konsistensi mutu pelayanan. Kerangka nasional menempatkan standar sebagai kewajiban hukum: PP No. 2/2018 mendefinisikan SPM sebagai ukuran jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah, dan Permendagri No. 59/2021 menurunkan tata cara penerapannya di daerah agar terukur, diaudit, dan berorientasi hasil. Dengan bertumpu pada dua regulasi ini, “klinik SOP” di Tamilouw dirancang untuk menerjemahkan mandat normatif menjadi prosedur kerja yang jelas di meja pelayanan dan titiktitik layanan masyarakat. ([Peraturan bpk](#))

Secara praktis, setiap SOP disusun ringkas dan operasional: definisi layanan, persyaratan dokumen, langkah berurutan, batas waktu layanan dan standar waktu tanggap (SLA), biaya (jika ada), serta alur penanganan keluhan. Format ini bukan hanya memotong “biaya transaksi” warga, tetapi juga memudahkan pengawasan mutu melalui *checklist* dan *logbook* pengaduan, sehingga *service recovery* dapat dilakukan cepat saat terjadi penyimpangan standar. Agar tidak berhenti sebagai dokumen, SOP disosialisasikan ke publik melalui *service charter* yang dipasang di titik layanan dan kanal daring desa; langkah ini sejalan dengan semangat akuntabilitas SPM mutu layanan harus tampak dan terukur oleh warga, bukan sekadar dilaporkan oleh penyelenggara. ([peraturan.bpk.go.id](#))

Untuk memastikan standar menyatu dengan perencanaan dan anggaran 2025, SOP ditautkan ke indikator hasil dan fokus penggunaan Dana Desa terbaru. Permendesa PDIT No. 2/2024 mengarahkan Dana Desa 2025 pada layanan dasar termasuk kesehatan ibu-anak, percepatan penurunan stunting, penguatan ketahanan pangan, dan perlindungan kelompok rentan sehingga setiap SOP prioritas (misalnya rujukan ibu hamil risiko tinggi atau cakupan D/S posyandu) memiliki indikator kuantitatif yang menjadi dasar pengalokasian belanja dan evaluasi triwulan. Penautan SOP ↔ indikator ↔ anggaran ini menghindari “daftar kegiatan” yang generik dan mendorong konvergensi program lintas-sektor di tingkat desa/negeri. ([JDIH](#))

Kualitas standar layanan juga sangat bergantung pada integrasi Rumah Dataku sebagai *single source*

of truth. Pedoman BKKBN terkini menegaskan peran Rumah Dataku sebagai pusat data kependudukan tingkat desa untuk perencanaan, pemantauan, dan edukasi, dengan kamus data, tata cara pembersihan, dan ritme pemutakhiran yang jelas. Dengan menarik indikator SOP langsung dari set data ini, Tamilouw mengurangi disparitas angka, mempercepat validasi target triwulan, dan memungkinkan forum musyawarah membaca capaian berbasis bukti. Penguatan ini serasi dengan payung kebijakan kampung keluarga berkualitas yang menekankan integrasi perencanaan–pelaksanaan–pemantauan di semua level.

Dari sisi kelembagaan, keberlanjutan standar ditopang oleh tiga tindakan: *pertama*, pengesahan SOP melalui keputusan kepala pemerintahan negeri; *kedua*, review triwulan berbasis indikator untuk memperbarui SOP sesuai temuan lapangan; *ketiga*, penautan pengaduan warga ke SLA dan *service charter* untuk menjaga kepercayaan publik. Untuk layanan yang menyentuh urusan wajib daerah, koordinasi dengan puskesmas/OPD menjadi bagian dari SOP (misalnya *cut-off* waktu rujukan ibu hamil), sehingga rantai layanan tidak terputus di batas kewenangan desa. Dengan demikian, standar yang terdokumentasi benar-benar berfungsi sebagai “kontrak layanan” antara pemerintahan negeri dan warga terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan menurut kerangka SPM nasional serta fokus pendanaan 2025. (peraturan.bpk.go.id+1)

Disparitas Data & Tata Kelola (Rumah Dataku sebagai *Single Source of Truth*)

Perbedaan angka antara data administrasi pemerintah negeri dan dasbor Kampung KB pada dasarnya berakar pada tiga hal: definisi operasional yang tidak seragam, entri ganda/inkonsisten, serta ritme pemutakhiran yang berbeda antarpelaksana. Tanpa kesepakatan atas “satu sumber kebenaran”, musyawarah cenderung digerakkan oleh persepsi, bukan bukti; akibatnya prioritas dan anggaran berisiko bias dan sukar diaudit. Karena itu, program menempatkan Rumah Data Kependudukan (Rumah Dataku) sebagai *single source of truth* tingkat negeri dengan dua mandat utama: menyediakan data

yang akurat–mutakhir dan menjadi simpul literasi data bagi pengambil keputusan lokal. Pedoman terkini BKKBN menegaskan fungsi Rumah Dataku sebagai pusat pengelolaan, penyajian, dan edukasi data keluarga kependudukan berbasis masyarakat, termasuk penggunaan aplikasi berbasis web untuk efisiensi pengumpulan dan pemutakhiran informasi. Dengan positioning ini, Tamilouw memiliki landasan kelembagaan yang jelas untuk menyatukan angka dan bahasa data antaraktor. ([Docu BKKBN DIY+1](#))

Operasionalisasi *single source of truth* dilakukan melalui data clinic yang menghasilkan empat produk kunci: *pertama*, kamus data (data dictionary) yang menyelaraskan definisi misalnya perbedaan unit analisis “keluarga yang memiliki balita” dengan “PUS aktif”; *kedua*, prosedur pembersihan (data cleaning) untuk menghapus duplikasi dan mengoreksi anomali; *ketiga*, matriks peran & akuntabilitas yang menetapkan siapa menginput apa, kapan, dan bagaimana *quality check* dilakukan; *keempat*, ritme pemutakhiran triwulan yang disejajarkan dengan siklus monev dan musyawarah negeri. Paket ini membuat forum perencanaan beralih dari narasi ke angka terverifikasi: indikator prioritas seperti cakupan D/S posyandu, K1–K4, imunisasi dasar lengkap, serta kelengkapan dokumen adminduk per KK dibaca langsung dari Rumah Dataku, bukan dari tabel ad-hoc. Praktik ini sejalan dengan arsitektur SPM yang mewajibkan pelayanan dasar diukur mutu dan jangkauannya secara teratur mulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, hingga penyusunan rencana pemenuhan layanan sebagaimana ditegaskan dalam PP 2/2018 dan Permendagri 59/2021. (peraturan.bpk.go.id+1)

Perubahan yang paling nyata muncul pada musyawarah dan anggaran. Ketika indikator bersifat tunggal dan dapat diaudit, prioritas belanja tidak lagi “mengikuti kegiatan”, tetapi menempel pada target hasil—misalnya tambahan jadwal posyandu keliling untuk RT dengan cakupan D/S terendah, atau pembiayaan operasional kanal pengaduan yang dibuktikan mempercepat waktu tanggap. Kebijakan Permendesa 2/2024 yang menjadi petunjuk operasional fokus penggunaan dana desa tahun 2025 memperkuat orientasi ini karena

menuntut konvergensi belanja pada layanan dasar kesehatan, perlindungan sosial, dan kelompok rentan. Dengan demikian, tautan indikator ↔ SOP ↔ pos anggaran menjadi jalur logis untuk menjaga akuntabilitas dan dampak. [JDIH Kementerian Desa+1](#)

Meski demikian, tata kelola data tingkat mikro memiliki risiko kelelahan administrasi bila seluruh beban verifikasi ditumpukan pada sedikit orang. Untuk itu, mitigasi dirancang dalam tiga lapis. *Pertama*, formulir digital sederhana (mis. spreadsheet terstandar atau aplikasi Rumah Dataku) agar entri lapangan seragam dan minim kesalahan; *kedua*, rotasi operator & *peer review* antar-kader untuk mencegah ketergantungan individu dan memperkuat kultur saling memeriksa; *ketiga*, pemeriksaan mutu triwulan oleh tim kecil lintas unit (perangkat negeri, kader, PLKB/PKB) sebelum angka tampil di *dashboard* musyawarah. Pendekatan ini konsisten dengan pedoman optimalisasi kampung keluarga berkualitas yang menekankan integrasi perencanaan– pelaksanaan pemantauan lintas level dan pentingnya dukungan kapasitas pengelola data. ([Docu BKKBN DIY](#))

Pada akhirnya, menjadikan Rumah Dataku sebagai *single source of truth* bukan sekadar pilihan teknis, melainkan strategi kelembagaan untuk menutup jurang antara standar dan praktik. Ketika definisi disepakati, alur pembersihan dibakukan, dan ritme pemutakhiran dipatuhi, maka indikator SPM menjadi kompas bersama dalam rapat triwulan. Hal ini bukan hanya memenuhi mandat regulasi, tetapi juga menggeser budaya tata kelola: dari *activity-based* menuju *evidence-based*, dari laporan panjang menuju visualisasi indikator yang mudah dibaca, dan dari klaim kinerja menuju akuntabilitas yang dapat diverifikasi oleh warga

Koordinasi Lintas-Aktor & Monev Triwulan

Koordinasi lintas-aktor di Tamilouw bergerak dari pola forum informatif menuju forum pengambilan keputusan yang berbasis indikator. Pergeseran ini dimungkinkan karena tiga unsur berjalan serempak: adanya standar layanan (SOP) yang dipahami bersama, ketersediaan data yang telah divalidasi melalui Rumah Dataku, dan penautan agenda

rapat triwulan pada siklus perencanaan penganggaran pelaporan. Dalam bingkai regulasi nasional, praktik tersebut konsisten dengan arsitektur SPM yang menuntut pengukuran mutu dan jangkauan pelayanan dasar secara teratur, sekaligus sejalan dengan tata cara evaluasi pembangunan yang menekankan keterukuran kinerja dan efektivitas penggunaan sumber daya di tingkat daerah. Dengan kata lain, rapat triwulan bukan lagi sekadar penyampaian progres, melainkan lokus akuntabilitas yang memeriksa apakah standar layanan benar-benar terpenuhi dan apa koreksi yang harus segera dilakukan. ([peraturan.bpk.go.id+1](#))

Di meja koordinasi, *dashboard* sederhana menampilkan capaian indikator cakupan D/S posyandu, K1–K4, imunisasi dasar lengkap, partisipasi PIK R, kelengkapan dokumen adminduk per KK sebagai dasar dialog. Fasilitator memandu pembacaan peta RT/dusun untuk menemukan titik lemah, kemudian mengikat tindak lanjut pada penanggung jawab dan tenggat yang realistis. Pola ini memperkecil jeda antara temuan dan tindakan korektif: jadwal posyandu keliling disesuaikan untuk menjangkau wilayah dengan capaian rendah; alur rujukan ibu hamil risiko tinggi dipertegas dengan batas waktu yang selaras dengan SOP; dan kanal pengaduan dipantau melalui *logbook* agar waktu tanggap tetap terjaga. Karena forum menyandarkan keputusan pada indikator terverifikasi, suasana musyawarah lebih inklusif suara perempuan, remaja, dan kelompok rentan memperoleh tempat yang sah melalui bukti yang dapat diuji pada pertemuan berikutnya. Praktik ini sejalan dengan pedoman optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas yang menekankan integrasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian lintas level kelembagaan. ([Docu BKKBN DIY](#))

Keputusan triwulan kemudian ditautkan pada penganggaran agar tidak berhenti sebagai komitmen moral. Di sini, pengelolaan keuangan desa menjadi instrumen pengikat: keluaran rapat misalnya tambahan biaya operasional untuk layanan keliling atau penyediaan media informasi *service charter* di titik layanan diarahkan masuk ke pos yang sah

menurut tata kelola APBDes. Penautan keputusan-anggaran ini memperkuat garis akuntabilitas: siapa mengeksekusi, dari pos mana biaya diambil, dan indikator apa yang akan dibuktikan pada triwulan berikutnya. Kerangka pengelolaan keuangan desa menegaskan bahwa keseluruhan siklus perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban harus transparan dan dapat diaudit, sehingga keputusan forum triwulan memperoleh dasar administratif dan legal yang kuat di tingkat desa.

(peraturan.bpk.go.id+1)

Agar koordinasi lintas-aktor tidak terputus, terutama saat terjadi rotasi perangkat atau kader, Tamilouw mengembangkan paket *onboarding* singkat yang memuat SOP, *service charter*, peta indikator, dan tata laku rapat. Paket ini menjembatani regenerasi peran, mengurangi ketergantungan pada individu, dan menjaga ritme belajar kelembagaan. Di sisi lain, fokus penggunaan Dana Desa tahun berjalan mendorong forum untuk memprioritaskan intervensi yang langsung menutup kesenjangan layanan dasar misalnya percepatan layanan kesehatan ibu-anak, penguatan perlindungan kelompok rentan, dan pengelolaan

saluran pengaduan warga sehingga keputusan koordinasi terikat pada mandat nasional yang paling mutakhir. Dengan demikian, siklus koordinasi-monev triwulan di Tamilouw berdiri di atas tiga kaki yang saling mengunci: standar layanan yang jelas, data tunggal yang kredibel, dan pembiayaan desa yang diarahkan pada keluaran prioritas. ([JDIH Kementerian Desa](#))

Pada tataran kebijakan yang lebih luas, desain koordinasi tersebut menyatu dengan tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah mulai dari pemantauan kinerja hingga penilaian efektivitas penggunaan sumber daya sebagaimana diatur dalam Permendagri 86/2017. Sinkronisasi ini menguntungkan karena membuka jalur kolaborasi dengan puskesmas dan organisasi perangkat daerah saat layanan menyentuh urusan wajib daerah, sekaligus memudahkan pelaporan kinerja lintas level. Hasilnya, forum triwulan berfungsi sebagai “engsel” yang menyambungkan standar lokal, data mikro, dan pembinaan supradesa, sehingga setiap keputusan memiliki konsekuensi operasional yang jelas di lapangan dan rujukan regulatif yang kuat di atasnya



Dok. Tim pengabdian, 2025

Partisipasi Bermakna & Mekanisme Pengaduan-Mediasi

Penguatan partisipasi warga di Tamilouw bertumpu pada dua rel yang saling mengunci: ruang musyawarah yang benar-benar inklusif dan mekanisme pengaduan-mediasi yang jelas, cepat, serta dapat diaudit. Di tingkat kelembagaan, jalur kedua memperoleh pijakan regulatif yang kuat setelah terbitnya Permendagri No. 8 Tahun 2023 tentang pengelolaan pengaduan di lingkungan kemendagri dan pemerintahan daerah. Aturan ini memperbarui tata kelola aduan di level daerah mulai dari pencatatan, pengkajian, pemeriksaan, pelaporan, hingga pemantauan tindak lanjut dan sekaligus mencabut pedoman lama tahun 2007/2011 agar selaras dengan perkembangan pelayanan publik. Di Tamilouw, substansi permendagri ini diadaptasi menjadi alur pengaduan tingkat negeri: titik masuk yang mudah diakses, logbook status kasus, batas waktu respons, dan penutupan perkara dengan berita acara yang dapat ditinjau kembali pada rapat triwulan. Dengan demikian, forum musyawarah tidak sekadar menimbang aspirasi, tetapi memeriksa kerja nyata sistem keluhan yang kini memiliki standar prosedural dan rujukan hukum yang mutakhir ([Peraturan BPK+1](#)).

Di atas rel pertama, kualitas partisipasi ditingkatkan dari "hadir dan mendengar" menjadi "ikut menentukan prioritas berbasis bukti". Fasilitator mendorong perempuan, remaja, dan kelompok rentan berbicara dengan dukungan data Rumah Dataku, sehingga pengalaman sehari-hari kesulitan akses posyandu atau kebingungan mengurus adminduk ditautkan pada indikator yang terukur. Praktik ini sejalan dengan agenda kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengenai partisipasi bermakna kelompok rentan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan; narasi kebijakan 2024 menekankan pentingnya ruang yang aman dan efektif bagi perempuan dan anak untuk memberi masukan, memantau, serta menilai layanan yang menyentuh kehidupan mereka. Dampaknya, keputusan prioritas misalnya memperbanyak layanan posyandu keliling untuk RT dengan capaian D/S rendah atau mempertegas jalur rujukan ibu hamil risiko tinggi lahir

dari kombinasi kesaksian pengguna dan angka yang dapat diverifikasi pada pertemuan berikutnya. ([KemenPPPA+1](#))

Kehadiran SP4N-LAPOR! di tingkat nasional melengkapi ekosistem pengaduan lokal dengan kanal lintas-pemerintah yang terintegrasi. PermenPANRB No. 46 Tahun 2020 menegaskan *roadmap* 2020–2024 agar pengaduan pelayanan publik terkoneksi, mudah diakses, dan berujung pada perbaikan layanan. Bagi Tamilouw, kanal nasional ini berfungsi sebagai *fallback* dan media eskalasi apabila aduan menyentuh kewenangan di atas desa atau membutuhkan dukungan lintas sektor. Integrasi ini membuat warga memiliki beberapa jalur yang saling menguatkan: kanal negeri yang cepat dan dekat, serta kanal nasional yang memastikan masalah yang lebih kompleks tidak terhenti di batas kewenangan lokal ([Peraturan BPK](#)).

Dimensi partisipasi remaja diorkestrasi melalui ekosistem PIK R yang sudah hidup di Tamilouw. Pedoman operasional BKKBN menempatkan PIK R sebagai ruang edukasi dan konseling sebaya yang efektif untuk menyuarakan kebutuhan remaja dalam layanan kesehatan reproduksi, keterampilan hidup, hingga pencegahan kekerasan. Ketika forum musyawarah memberi slot presentasi khusus kepada perwakilan PIK R disertai data partisipasi dan isu prioritas diskusi menjadi lebih tajam: rencana kegiatan tidak lagi seremonial, tetapi beririsan langsung dengan indikator partisipasi dan capaian literasi kesehatan yang mudah dilacak triwulan berikutnya. ([SLOT THAILAND](#))

Agar kedua rel saling memperkuat, tata kelola pengaduan di Tamilouw dipautkan secara eksplisit ke *service charter* setiap layanan: warga tahu haknya, tahu standar waktu tanggap, dan tahu ke mana harus melapor jika standar tidak terpenuhi. Di belakang layar, perangkat negeri mengoperasikan matriks akuntabilitas yang mengaitkan tiap jenis aduan dengan unit penanggung jawab, tenggat penyelesaian, dan bukti perbaikan yang harus diumumkan pada papan informasi dan *dashboard*. Desain seperti ini bersesuaian dengan arsitektur SPM yang menuntut mutu layanan dasar diukur dan dipertanggungjawabkan serta memberi "jalur

cepat" koreksi layanan tanpa menunggu satu tahun anggaran. ([Peraturan BPK](#))

Risiko "kelelahan pengaduan" diantisipasi dengan triase awal, mediasi berbasis adat untuk sengketa relasional, dan rujukan cepat ke sektor di atas desa bila perkara menyentuh urusan wajib daerah. Bukan hanya mempercepat penyelesaian, triase ini juga menjaga kanal tetap kredibel di mata warga; aduan yang berulang dipetakan sebagai

bottleneck struktural dan menjadi bahan koreksi SOP pada review triwulan. Ketika partisipasi bermakna dan pengaduan yang terstandar berjalan serentak, budaya pelayanan bergeser dari defensif menjadi proaktif: perangkat negeri tidak menunggu masalah membesar, melainkan mengundang warga menguji janji layanan dan bersama-sama menutup kesenjangan yang tersisa



Dok Tim pengabdian

Kemandirian Ekonomi Keluarga (UPPKA) sebagai Pengungkit

Kemandirian layanan sosial kesehatan sulit dijaga jika rumah tangga sasaran tidak memiliki bantalan ekonomi. Di sinilah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) bekerja sebagai pengungkit: kelompok usaha berbasis komunitas yang memperkuat daya beli keluarga, menutup biaya tidak langsung layanan (transportasi rujukan, kehilangan jam kerja), dan menjaga keberlanjutan partisipasi pada posyandu, PIK R, maupun layanan lansia. Dalam arsitektur kampung keluarga berkualitas, UPPKA bukan program berdiri sendiri, melainkan simpul yang mengaitkan pembinaan keluarga, literasi keuangan sederhana, dan jejaring pemasaran lokal sehingga luaran ekonomi ikut menopang indikator layanan dasar yang ditetapkan lewat SPMDesa. Pedoman nasional menempatkan UPPKA sebagai bagian dari penguatan ekonomi

keluarga akseptor dan keluarga sasaran lain di Kampung KB, dengan mandat pembinaan, permodalan sesuai kemampuan, dan orientasi pada kesejahteraan keluarga. ([Docu BKKBN DIY+1](#))

Pada level kebijakan pendanaan desa tahun berjalan, Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2024 (petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025) memberi ruang konvergensi yang kuat: Dana Desa diarahkan untuk layanan dasar kesehatan (termasuk percepatan penurunan stunting), perlindungan kelompok rentan, ketahanan pangan, hingga pengembangan potensi dan keunggulan desa. Ini memberikan payung agar desain UPPKA Tamilouw tidak hanya "menambah kegiatan ekonomi", tetapi secara eksplisit mengikat sebagian hasil/dukungan operasionalnya pada pencapaian indikator layanan prioritas misalnya membantu pembiayaan transport rujukan ibu hamil risiko tinggi, paket nutrisi balita di RT dengan capaian

D/S rendah, atau insentif berbasis hasil untuk *peer educator* remaja. Dengan menautkan UPPKA ↔ indikator SPMDesa ↔ pos anggaran Dana Desa, musyawarah triwulan memiliki tuas yang jelas untuk mengukur dampak ekonomi terhadap mutu layanan. (JDIH)

Secara operasional, perintisan UPPKA di Tamilouw dimulai dari pemetaan minat dan kapasitas keluarga, audit aset (bahan baku lokal, keterampilan, akses pasar), serta penyusunan AD/ART kelompok yang sederhana namun tegas dalam tata kelola kas, pembagian peran, dan mekanisme bagi hasil. Praktik baik di berbagai kampung KB menunjukkan bahwa pembinaan rutin, pencatatan keuangan yang disiplin, dan kurasi portofolio produk terutama olahan pangan lokal dan jasa menentukan keberlanjutan kelompok. Rujukan kelembagaan BKKBN menggarisbawahi bahwa sasaran UPPKA mencakup keluarga akseptor dan keluarga lain yang berminat, dengan dukungan pendampingan PLKB/PKB dan jejaring lintas sektor di daerah. Dengan kerangka ini, Tamilouw menempatkan UPPKA sebagai “mesin bantu” layanan: sebagian surplus dialokasikan untuk biaya operasional layanan keliling ke RT ber-cakupan rendah dan untuk penguatan kanal aduan agar *service recovery* bisa berjalan cepat. (Doc. BKKBN)

Pengukuran dampak ekonomi UPPKA sengaja dirancang tidak terlepas dari *dashboard* SPMDesa. Indikator sederhana seperti tren omzet kelompok, jumlah anggota aktif, dan rasio dana yang dialokasikan untuk mendukung layanan ditampilkan berdampingan dengan indikator layanan dasar (cakupan D/S posyandu, K1–K4, imunisasi dasar lengkap, kelengkapan dokumen adminduk per KK). Ketika dua himpunan indikator ini dibaca bersamaan pada rapat triwulan, forum dapat menilai apakah penguatan ekonomi keluarga benar-benar mengurangi hambatan akses layanan, serta menyesuaikan strategi kelompok (misalnya memindahkan lokasi penjualan agar dekat hari posyandu, atau menata ulang jadwal produksi agar tidak bentrok dengan pelayanan PIK R). Pendekatan ini selaras dengan pedoman optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas yang menekankan integrasi perencanaan–pelaksanaan–pemantauan lintas

level, berbasis data yang dapat diaudit. (Docu BKKBN DIY)

Risiko implementasi tetap perlu diantisipasi. *Pertama*, stagnasi usaha akibat produk tanpa keunikan dan akses pasar yang sempit; mitigasinya ialah kurasi produk, uji pasar kecil (*pilot*), dan kemitraan dengan gerai lokal/online di kecamatan/kabupaten. *Kedua*, kelelahan pengurus karena beban administrasi dan produksi; ini dijawab dengan rotasi peran, pelatihan *bookkeeping* sederhana, dan penggunaan format pembukuan standar. *Ketiga*, ketergantungan pada hibah awal; maka skema permodalan bertahap dan *revolving fund* internal lebih disarankan agar kelompok belajar mengelola arus kas. *Keempat*, hubungan longgar dengan layanan dasar; karenanya, setiap rencana kerja UPPKA memasang *tagging* indikator layanan yang akan didukung, sehingga kontribusi ekonomi baik berupa uang, barang, maupun layanan terlihat pada *dashboard* dan ikut dipertanggungjawabkan pada forum triwulan. Rangkaian langkah ini konsisten dengan regulasi dan materi pembinaan ekonomi keluarga terbaru yang mendorong pemberdayaan ekonomi rumah tangga sasaran Kampung KB untuk menopang hasil pembangunan manusia, termasuk penurunan stunting.

Dengan desain seperti itu, UPPKA bukan sekadar *alat bantu ekonomi*, melainkan arsitektur pengungkit yang memastikan perubahan perilaku sosial–kesehatan memiliki fondasi finansial. Ketika kelompok usaha berjalan sehat, biaya tidak langsung layanan berkurang, partisipasi meningkat, dan standar layanan yang tertuang dalam SOP–*service charter* lebih mudah ditegakkan. Pada gilirannya, Tamilouw memperoleh siklus kebajikan: standar memandu layanan, data memandu keputusan, ekonomi keluarga menopang akses, dan rapat triwulan menjaga semuanya tetap selaras dengan mandat SPM dan fokus pendanaan 2025

Konvergensi Program–Anggaran dengan SPMDesa & SDGs Desa

Konvergensi program–anggaran dimaknai sebagai upaya menyatukan standar layanan (SPMDesa), data terverifikasi, dan pembiayaan desa agar setiap rupiah berlabuh pada indikator hasil,

bukan sekadar daftar kegiatan. Secara normatif, arah ini mempunyai fondasi kuat: PP No. 2/2018 mengharuskan pelayanan dasar ditetapkan jenis mutunya serta diukur capaian pemenuhannya, sementara Permendagri No. 59/2021 menurunkan tata cara penerapan SPM agar terkelola, terukur, dan dapat diaudit lintas urusan wajib. Dengan bingkai tersebut, keputusan layanan di Tamilouw dari cakupan posyandu, rujukan ibu hamil risiko tinggi, hingga kecepatan respons pengaduan harus menaut pada indikator yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam forum triwulan. ([Peraturan BPK](#))

Di tingkat kebijakan desa, konvergensi makin menguat berkat Permendesa PDTT No. 2/2024 yang memberikan petunjuk operasional fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Regulasi ini menegaskan prioritas pada layanan dasar kesehatan ibu-anak dan penurunan stunting, perlindungan kelompok rentan, ketahanan pangan, peningkatan ekonomi lokal serta menuntut tata kelola yang mengikat program pada hasil. Tamilouw memanfaatkan payung ini untuk menautkan indikator SPMDesa ke pos belanja: misalnya, belanja operasional layanan keliling diarahkan spesifik ke RT dengan cakupan D/S terendah; dukungan komunikasi publik difokuskan untuk menegakkan *service charter* dan kanal pengaduan; dan biaya rujukan ibu hamil diikat pada ambang waktu yang tercantum dalam SOP. Dengan demikian, matriks “indikator ↔ program ↔ pos anggaran” bukan hanya dokumen administrasi, melainkan peta jalan pembiayaan yang mengonversi standar menjadi pelayanan nyata. ([JDIH Kementerian Desa+1](#))

Agar pengikatan keputusan–anggaran berjalan tertib, rujukan pada Permendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi penting: seluruh siklus perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban harus transparan dan dapat diaudit. Di Tamilouw, hasil rapat triwulan yang berbasis indikator masuk ke dokumen penganggaran dan pelaksanaannya tercatat dalam bukti belanja yang dilampiri evidensi capaian (misalnya kenaikan cakupan D/S atau penurunan waktu tanggap pengaduan). Praktik ini sekaligus

memudahkan pembinaan supradesa ketika layanan menyentuh kewenangan kabupaten, karena bukti indikator dan arus dana tersaji rapi sesuai kaidah akuntansi desa. ([Peraturan BPK](#))

Konvergensi juga menuntut sinkronisasi dengan siklus perencanaan–pengendalian–evaluasi pembangunan daerah agar jalur kolaborasi lintas perangkat daerah terbuka. Permendagri No. 86/2017 menyediakan kerangka prosedural bagi perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan; penyelarasan inilah yang membuat indikator SPMDesa Tamilouw dapat “naik kelas” menjadi bagian dari dialog kinerja lintas level misalnya ketika puskesmas dan dinas terkait ikut menutup *bottleneck* rujukan atau logistik layanan. Dengan cara ini, standar desa tidak terhenti pada batas administratif desa, tetapi tersambung ke rantai layanan urusan wajib daerah sesuai mandat SPM. ([Peraturan BPK+1](#))

Terakhir, arah konvergensi diikat pada horizon tujuan SDGs Desa agar keberpihakan pada kelompok rentan dan pengurangan kesenjangan menjadi benang merah pembangunan. Permendesa PDTT No. 21/2020 menegaskan SDGs Desa sebagai pedoman kebijakan desa; literatur evaluatif terkini juga menunjukkan bahwa pemutakhiran data SDGs Desa digunakan untuk memilih prioritas dan memantau keberhasilan kegiatan di tingkat desa. Dengan menautkan indikator SPMDesa pada sasaran SDGs Desa misalnya gizi baik, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, dan institusi yang tangguh, Tamilouw memastikan bahwa belanja desa tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga relevan secara sosial dan keberlanjutan. ([Peraturan BPK](#))

Ringkasnya, konvergensi program–anggaran di Tamilouw berdiri di atas empat pilar regulatif dan operasional: SPM sebagai standar dan ukuran (PP 2/2018; Permendagri 59/2021), fokus pendanaan desa 2025 yang mengutamakan layanan dasar (Permendesa 2/2024), disiplin pengelolaan keuangan desa (Permendagri 20/2018) yang menyajikan bukti penggunaan dana terhadap capaian indikator, serta sinkronisasi perencanaan–evaluasi daerah (Permendagri 86/2017) yang membuka kolaborasi lintas level. Ketika keempatnya diikat dengan horizon SDGs Desa (Permendesa

21/2020), standar yang disepakati di forum triwulan terkonversi menjadi keputusan anggaran yang adil, terukur, dan berdampak nyata bagi warga. ([Peraturan BPK+5](#))

Kebaruan Artikel

1. SPMDesa sebagai “kontrak layanan”. SPMDesa diturunkan ke SOP ringkas per layanan dan *service charter* ber-SLA yang ditempel di titik layanan, sehingga standar bergeser dari dokumen normatif menjadi komitmen layanan publik yang bisa diaudit pada rapat triwulan.
2. Arsitektur data tunggal melalui Rumah Dataku. “Data clinic” menyelaraskan definisi, pembersihan data, matriks peran, dan ritme pemutakhiran triwulan; indikator (D/S posyandu, K1–K4, imunisasi, dokumen adminduk/KK, partisipasi PIK R, layanan BKL) ditarik langsung dari Rumah Dataku, lengkap dengan *quality check* berkala dan mitigasi beban (formulir digital, rotasi operator).
3. Koordinasi berbasis indikator + replikasi terjaga. Forum triwulan menjadi lokus akuntabilitas: *dashboard* memandu keputusan, tindak lanjut selalu bertanda penanggung jawab–tenggat–bukti. Paket *onboarding/replication toolkit* (SOP, *service charter*, peta indikator, protokol rapat, templat *dashboard*) menjaga mutu saat rotasi kader dan memudahkan replikasi ke negeri sekitar; pendekatan partisipatif tetap dijalankan namun *evidence-based*.
4. Jalur ganda pengaduan yang terstandar dan terukur. Mekanisme pengaduan–mediasi lokal ditautkan ke *service charter* dan *logbook* SLA, serta terintegrasi kanal nasional SP4NLAPOR! untuk eskalasi lintas kewenangan menciptakan *safety net* akuntabilitas dari level negeri hingga supradesa.
5. Pengungkit ekonomi ↔ kinerja layanan ↔ anggaran. UPPKA diikat langsung ke indikator layanan (mis. dukungan rujukan ibu hamil, nutrisi balita, edukator sebaya) dan ditampilkan berdampingan di *dashboard*. Keputusan forum selalu dikunci dalam matriks indikator ↔ program ↔ pos APBDes (selaras fokus Dana Desa 2025), memastikan setiap rupiah membeli capaian

indicator bukan sekadar aktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan 2025–2026.

KESIMPULAN

Program “Menuju Kemandirian Negeri: Program Edukasi SPMDesa di Negeri Tamilouw Tahun 2025” menunjukkan bahwa kemandirian layanan dasar dapat dibangun ketika standar, data, forum, dan pembiayaan dikunci dalam satu arsitektur tata kelola. SPMDesa tidak berhenti sebagai regulasi, melainkan dihidupkan melalui SOP ringkas dan *service charter* ber-SLA yang memberi kepastian hak bagi warga dan kepastian kerja bagi penyelenggara. Kejelasan standar ini dipasangkan dengan Rumah Dataku sebagai *single source of truth*, sehingga musyawarah dan penganggaran berangkat dari bukti yang terverifikasi, bukan dari asumsi.

Perubahan penting tampak pada cara aktor lokal mengambil keputusan. Forum triwulan bergerak dari seremoni laporan menjadi lokus akuntabilitas: indikator yang ditampilkan pada *dashboard* memandu koreksi cepat di lapangan, memperjelas penanggung jawab dan tenggat, serta menyediakan rekam jejak perbaikan yang bisa diaudit. Mekanisme pengaduan–mediasi yang ditautkan ke *service charter* dan *logbook* SLA memperkuat kepercayaan warga, sekaligus memberi jalur eskalasi ketika perkara melampaui kewenangan desa. Di saat yang sama, UPPKA diposisikan sebagai pengungkit ekonomi keluarga agar biaya tidak langsung akses layanan dapat diatasi, sehingga partisipasi pada posyandu, PIK R, dan layanan lansia lebih berkelanjutan.

Konvergensi program–anggaran memastikan setiap rupiah benar-benar membeli capaian indikator prioritas mulai dari cakupan D/S posyandu, K1–K4, imunisasi dasar lengkap, kelengkapan dokumen adminduk, hingga kecepatan respons pengaduan. Penautan indikator ↔ program ↔ pos APBDes yang selaras dengan fokus Dana Desa 2025 dan horizon SDGs Desa menjadikan keputusan forum tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga relevan secara sosial dan berjangka panjang. Dengan paket *onboarding* dan alat replikasi, mutu implementasi tetap terjaga saat terjadi rotasi

perangkat atau kader, serta membuka peluang penyebarluasan praktik baik ke negeri sekitar.

Keterbatasan tetap ada, terutama pada kebutuhan disiplin validasi data mikro, uji kelayakan SOP di wilayah geografis menantang, dan kesinambungan pasar bagi UPPKA. Namun strategi mitigasi yang telah disiapkan formulir digital sederhana, rotasi operator dan peer review data, penyesuaian layanan keliling, kurasi produk dan jejaring pemasaran memberi landasan realistis untuk konsistensi implementasi. Ke depan, keberhasilan program ditentukan oleh ketekunan menjalankan tiga poros utama: menjaga kredibilitas data, menegakkan standar layanan, dan memelihara forum triwulan yang jujur membaca bottleneck dan berani melakukan service recovery.

Dengan demikian, inisiatif edukasi SPMDesa di Tamilouw layak dipandang sebagai model integratif yang terlihat, terukur, dan terbiayai. Ketika standar yang jelas berpijak pada data yang kredibel, dikelola melalui forum yang akuntabel, diperkuat pengungkit ekonomi keluarga, serta didukung konvergensi anggaran, kemandirian negeri tidak lagi sekadar visi, melainkan praktik yang sehari-hari dirasakan manfaatnya oleh warga.

REFERENSI

- Pemerintah RI. PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (naskah resmi BPK). peraturan.bpk.go.id
- Kemendagri. Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM (naskah resmi BPK/Localise SDGs). peraturan.bpk.go.id+1
- Kemendes PDTT. Permendesa No. 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (JDIH Kemendes; rilis/unduhan resmi). [JDIH Kementerian Desa+1](http://JDIH.KementerianDesa+1)
- BKKBN. Buku Saku Rumah Data Kependudukan (edisi 2024) dan Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (2024). Scribd+1
- PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM; Permendesa No. 2 Tahun 2024 (Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025); BKKBN—Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas & materi Rumah Dataku (2024).
- Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang *Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025*. [JDIH Kementerian Desa](http://JDIH.KementerianDesa)
- Permendagri No. 8 Tahun 2023 tentang *Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah* (teks & PDF resmi). [Peraturan BPK+1](http://PeraturanBPK+1)
- Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang *Penerapan Standar Pelayanan Minimal* (teks & PDF resmi). [Peraturan BPK+1](http://PeraturanBPK+1)
- PP No. 2 Tahun 2018 tentang *Standar Pelayanan Minimal* (teks & PDF resmi). [Peraturan BPK+1](http://PeraturanBPK+1)
- PermenPANRB No. 46 Tahun 2020 tentang *Road Map SP4N-LAPOR! 2020–2024* (teks & PDF resmi). [Peraturan BPK+1](http://PeraturanBPK+1)
- BKKBN (2024) – *Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas* (edisi terbaru, PDF). [Docu BKKBN DIY](http://DocuBKKBNDIY)
- BKKBN (2024) – *Buku Saku Rumah Data Kependudukan (Rumah Dataku)* (edisi 2024). Scribd
- BKKBN (2024) – *Buku Saku Katalog Data Rutin Sistem Informasi Keluarga (SIK) Program Bangga Kencana* (untuk harmonisasi indikator mikro). [Docu BKKBN DIY](http://DocuBKKBNDIY)
- Peraturan BKKBN No. 17 Tahun 2020 tentang *Pengelolaan Kelompok UPPKA* (rujukan dasar kelembagaan ekonomi keluarga; laman & unduhan). [Docu BKKBN DIY+1](http://DocuBKKBNDIY+1)
- Dokumen Pemerintah Daerah (2025) – contoh laporan implementasi SP4N-LAPOR! yang merujuk PermenPANRB 46/2020 (bahan operasional lintas daerah). [E-Arsip Kota Bontang](http://E-ArsipKotaBontang)